

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Agus Jatmiko, 2015, *Cara Mudah Memahami Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, PrimaPrint, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Benhard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya
- Dr. Aartje Tehupeiori, SH., M.H., 2017, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- H. Salim HS, dkk, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jarot Widya Muliawan, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta
- Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta,
- Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,

Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta

b. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS jo. PMK. No.165/PMK.06/2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.

c. Internet dan Wawancara

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol

<https://www.scribd.com/doc/52133659/TRASE-JALAN>

<https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/3.-Pengelolaan-BMN.pdf>

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wbjadO_n48J:https://sarmanpsagala.files.wordpress.com/2011/04/makalah-pengadaan-tanah.doc+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=id

Eva Monalisa K. Tambunan, SE, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai

Abdul Azis, S.H.,M.Kn, selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau

Muhammad Ganjar Nugraha, selaku Staf Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

